



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR

POLICY BRIEF

SATU JATIM INOVASI

**Ekosistem Kolaborasi untuk
Mengakselerasi Jawa Timur
sebagai Gerbang Baru Nusantara**

TEMA:

Inovasi Kebijakan dalam Mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara melalui Penguatan SDM, Konektivitas Ekonomi, Hilirisasi Potensi Daerah, dan Transformasi Digital

SUBTEMA:

Kolaborasi Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam Mendorong Inovasi Daerah



Oleh:

Makhfudz, SH., M.Si.

Widyaiswara Ahli Utama
BPSDM Provinsi Jawa Timur

Jatim
**GERBANG BARU
NUSANTARA**

POLICY BRIEF
SATU JATIM INOVASI
Ekosistem Kolaborasi untuk Mengakselerasi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara

Tema: Inovasi Kebijakan dalam Mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara melalui Penguatan SDM, Konektivitas Ekonomi, Hilirisasi Potensi Daerah, dan Transformasi Digital

Subtema: Kolaborasi Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam Mendorong Inovasi Daerah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jawa Timur memiliki fondasi ekonomi dan sumber daya manusia yang kuat untuk memperkuat perannya sebagai Gerbang Baru Nusantara. Pada tahun 2025, PDRB Jawa Timur mencapai Rp3.403,17 triliun, tumbuh 5,33 persen, dengan PDRB per kapita Rp80,86 juta. Industri pengolahan berkontribusi 31,32 persen terhadap perekonomian, sedangkan IPM mencapai 76,13.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya didukung ekosistem kolaborasi yang terintegrasi. Inovasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat masih cenderung berjalan secara sektoral sehingga pertukaran pengetahuan, pemanfaatan hasil riset, penerapan, hilirisasi, penyebarluasan praktik baik, dan replikasi inovasi belum optimal.

Berdasarkan Gap Analysis, Fishbone Analysis, Collaborative Governance, dan perbandingan alternatif kebijakan, persoalan utama terletak pada belum optimalnya keterhubungan antarpemangku kepentingan. Karena itu, direkomendasikan “SATU JATIM INOVASI”, yaitu ekosistem kolaborasi Quadruple Helix yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada dampak.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui empat instrumen: Forum Kolaborasi Inovasi Daerah; Roadmap dan Prioritas Inovasi Daerah; Dashboard Digital Kolaborasi dan Inovasi Terintegrasi; serta Sistem Insentif, Hilirisasi, dan Replikasi Inovasi. Melalui pendekatan tersebut, inovasi diharapkan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan pelayanan publik, hilirisasi potensi daerah, konektivitas ekonomi, transformasi digital, dan daya saing Jawa Timur.

I. PENDAHULUAN/LATAR BELAKANG

Perkembangan pembangunan yang semakin dinamis menuntut pemerintah daerah untuk adaptif, inovatif, dan mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Jawa Timur memiliki peluang besar memperkuat perannya sebagai Gerbang Baru Nusantara melalui penguatan SDM, konektivitas ekonomi, hilirisasi potensi daerah, transformasi digital, dan inovasi daerah.

Modal tersebut didukung oleh PDRB 2025 sebesar Rp3.403,17 triliun dengan pertumbuhan 5,33 persen dan PDRB per kapita Rp80,86 juta. Industri pengolahan menyumbang 31,32 persen, sedangkan IPM mencapai 76,13. Rata-rata lama sekolah mencapai 8,39 tahun dan harapan lama sekolah 13,44 tahun. Kondisi ini menyediakan basis ekonomi, pengetahuan, dan kapasitas SDM bagi pengembangan inovasi.

Akan tetapi, ketersediaan sumber daya belum otomatis menghasilkan inovasi yang berdampak luas. Inovasi memerlukan ekosistem yang menghubungkan masalah

pembangunan, pengetahuan, teknologi, sumber daya, dan aktor yang terlibat dalam penciptaan, pengembangan, penerapan, serta penyebarluasan inovasi.

Karena itu, inovasi daerah tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pengarah dan fasilitator; akademisi menghasilkan riset dan pengetahuan; dunia usaha mendorong pengembangan, penerapan, dan hilirisasi; sedangkan masyarakat menjadi sumber kebutuhan, gagasan, partisipasi, dan umpan balik.

Kolaborasi tersebut masih perlu diperkuat. Keterhubungan antara hasil riset, kebutuhan pembangunan, dukungan dunia usaha, dan aspirasi masyarakat belum berlangsung secara sistematis. Kondisi ini memicu fragmentasi, membatasi pemanfaatan hasil penelitian dan praktik baik, serta menghambat replikasi inovasi lintas sektor dan wilayah.

Padahal, RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025–2029 telah menyediakan arah kebijakan bagi penguatan inovasi dan kolaborasi. Tantangan Jawa Timur karenanya bukan hanya menghasilkan inovasi baru, melainkan membangun ekosistem inovasi yang kolaboratif, terintegrasi, adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada dampak.

II. PERMASALAHAN

Belum Optimalnya Kolaborasi Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam Ekosistem Inovasi Daerah di Jawa Timur

Permasalahan tersebut tercermin dalam lima gejala utama:

1. Inovasi masih berkembang secara sektoral

Jawa Timur memiliki kapasitas inovasi yang kuat dengan skor 86,95 dan predikat provinsi terinovatif dalam Innovative Government Award 2024. Namun, inovasi berbagai aktor belum sepenuhnya terhubung dalam sistem kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan replikasi praktik baik yang berkelanjutan.

2. Kolaborasi antaraktor belum terintegrasi

Pemerintah provinsi, 38 kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat memiliki sumber daya yang saling melengkapi, tetapi belum sepenuhnya dihubungkan dalam mekanisme terpadu dari identifikasi masalah, pengembangan gagasan dan riset, penerapan solusi, hingga replikasi.

2. Data, hasil riset, dan pengetahuan belum dimanfaatkan optimal

Penghargaan BRIDA/BAPPERIDA Optimal Tahun 2025 menunjukkan berkembangnya peran riset dan inovasi. Namun, data inovasi, hasil penelitian, praktik baik, kebutuhan dunia usaha, dan aspirasi masyarakat masih perlu diintegrasikan untuk memperkuat inovasi dan kebijakan berbasis bukti.

3. Hilirisasi hasil riset dan inovasi belum optimal

Besarnya ekonomi Jawa Timur dan dominannya industri pengolahan belum sepenuhnya diikuti keterhubungan kuat antara hasil riset, kebutuhan pembangunan, kemampuan dunia usaha, serta kebutuhan masyarakat dan pasar. Akibatnya, peluang penciptaan nilai tambah dan perluasan dampak inovasi belum maksimal.

4. Transformasi digital belum optimal sebagai penghubung kolaborasi

Podes 2025 mencatat seluruh desa dan kelurahan telah terjangkau sinyal telepon seluler, meskipun 149 desa/kelurahan masih memiliki kualitas sinyal lemah. Penguatan interoperabilitas data dan platform digital diperlukan agar teknologi menjadi sarana kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dokumentasi praktik baik, dan replikasi inovasi.

Intinya, masalah utama bukan kekurangan potensi atau jumlah inovasi, melainkan belum optimalnya sistem kolaborasi yang mengintegrasikan aktor, data, pengetahuan, teknologi, dan sumber daya dalam satu ekosistem inovasi.

III. ANALISIS PERMASALAHAN/DESKRIPSI MASALAH

Hasil Fishbone Analysis, Gap Analysis, analisis Collaborative Governance, dan perbandingan alternatif kebijakan menunjukkan bahwa akar persoalan pengembangan inovasi daerah adalah belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem yang saling terhubung.

Jawa Timur sesungguhnya memiliki kapasitas yang saling melengkapi: pemerintah memiliki kewenangan dan kelembagaan; akademisi memiliki riset, pengetahuan, dan teknologi; dunia usaha memiliki kapasitas pengembangan dan penerapan; masyarakat memiliki pengalaman, kebutuhan, gagasan, partisipasi, dan umpan balik. Kesenjangan muncul karena potensi tersebut belum sepenuhnya disinergikan dalam mekanisme kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Akibatnya, identifikasi masalah, pemanfaatan hasil riset, pengembangan solusi, penerapan inovasi, hilirisasi, dan replikasi belum selalu membentuk satu mata rantai yang utuh. Inovasi masih dapat berkembang secara sektoral atau lokal; hasil riset belum seluruhnya terhubung dengan kebutuhan pembangunan; peluang hilirisasi belum dimanfaatkan maksimal; dan keterlibatan masyarakat belum terintegrasi secara sistematis.

Dalam perspektif Collaborative Governance, pemerintah perlu bertindak sebagai pengarah, fasilitator, dan penghubung; akademisi sebagai penghasil pengetahuan dan bukti ilmiah; dunia usaha sebagai mitra pengembangan, penerapan, dan hilirisasi; serta masyarakat sebagai sumber aspirasi dan umpan balik. Keempat aktor tersebut membentuk basis Quadruple Helix.

Perbandingan tiga alternatif kebijakan—mempertahankan pola koordinasi yang ada, memperkuat forum koordinasi, dan membangun “SATU JATIM INOVASI”—menunjukkan alternatif ketiga sebagai pilihan paling komprehensif karena tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi membangun ekosistem kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur diposisikan sebagai orkestrator dan fasilitator yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan dari identifikasi masalah hingga pengukuran dampak. Arah kebijakan yang diperlukan adalah transformasi dari pola inovasi yang tersebar menuju ekosistem yang terintegrasi, kolaboratif, berbasis data, adaptif, dan berorientasi pada dampak.

Tabel 1. Matriks Analisis Multi-Kriteria Alternatif Kebijakan

Parameter / Kriteria	Opsi 1: Status Quo (Pola Koordinasi Sektoral Eksisting)	Opsi 2: Penguatan Forum Koordinasi Berkala	Opsi 3: SATU JATIM INOVASI (Ekosistem Quadruple Helix Terintegrasi)
Deskripsi Kebijakan	Mempertahankan mekanisme inovasi yang berjalan sporadis pada	Membentuk forum pertemuan rutin antarpemangku kepentingan tanpa	Membangun ekosistem kolaborasi terpadu berbasis <i>Quadruple Helix</i> yang

	masing-masing sektor/OPD tanpa platform integrasi.	didukung integrasi sistem data dan insentif hilirisasi.	mengintegrasikan forum, peta jalan, <i>dashboard</i> digital, dan sistem replikasi.
Kelayakan Teknis (<i>Technical Feasibility</i>)	Tinggi: Tidak membutuhkan perubahan regulasi atau infrastruktur baru.	Sedang: Mudah dilaksanakan melalui rapat koordinasi, namun rentan kehilangan komitmen tindak lanjut pasca-forum.	Tinggi: Mengoptimalkan kelembagaan BRIDA, Bappeda, Diskominfo, serta infrastruktur digital daerah yang sudah tersedia.
Efisiensi Sumber Daya (<i>Resource Efficiency</i>)	Rendah: Terjadi duplikasi riset, fragmentasi anggaran, dan inefisiensi akibat inovasi tidak terstandardisasi/terhilirisasi.	Sedang: Biaya penyelenggaraan kegiatan pertemuan rutin cukup tinggi dengan hasil tindak lanjut yang terbatas.	Sangat Tinggi: Mencegah duplikasi anggaran, memfasilitasi <i>resource sharing</i> , dan mempercepat replikasi inovasi antardaerah/sektor.
Dampak Strategis (<i>Strategic Impact</i>)	Rendah: Inovasi berhenti pada capaian administratif dan tidak berkesinambungan.	Sedang: Membangun komunikasi awal, namun belum mampu memecahkan masalah hilirisasi riset ke industri/pasar.	Sangat Tinggi: Menghubungkan seluruh siklus inovasi dari riset akademisi, hilirisasi dunia usaha, hingga kebutuhan publik secara nyata.

IV. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kebijakan Strategis: “SATU JATIM INOVASI”

“SATU JATIM INOVASI” direkomendasikan sebagai ekosistem kolaborasi inovasi daerah yang menghubungkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai pengarah dan fasilitator; akademisi sebagai penghasil riset dan pengetahuan; dunia usaha sebagai mitra pengembangan, penerapan, dan hilirisasi; serta masyarakat sebagai sumber kebutuhan, gagasan, partisipasi, dan penerima manfaat.

Kebijakan ini diarahkan untuk mengintegrasikan data, hasil riset, pengetahuan, kebutuhan pembangunan, potensi daerah, dan praktik baik; memperkuat pemanfaatan riset; mempercepat hilirisasi dan replikasi; serta memperluas dampak inovasi.

Empat Instrumen Utama

1. Forum Kolaborasi Inovasi Daerah

Wadah multipihak untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, mengembangkan gagasan, dan mempertemukan kebutuhan pembangunan, kapasitas riset, peluang hilirisasi, serta aspirasi masyarakat.

2. Roadmap dan Prioritas Inovasi Daerah Berbasis Kolaborasi

Arah bersama untuk menyelaraskan riset, kebutuhan pembangunan, peluang dunia usaha, dan aspirasi masyarakat. Prioritas inovasi diarahkan pada penguatan SDM, konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, hilirisasi potensi daerah, transformasi digital, dan pelayanan publik.

3. Dashboard Digital Kolaborasi dan Inovasi Terintegrasi

Platform bersama untuk menghubungkan data inovasi, hasil penelitian, permasalahan pembangunan, potensi daerah, kebutuhan dunia usaha, dan praktik baik. Dashboard mendukung pertukaran pengetahuan, pencarian solusi, penerapan, dan replikasi inovasi lintas sektor serta wilayah.

4. Sistem Insentif, Hilirisasi, dan Replikasi Inovasi

Mekanisme dukungan dan apresiasi bagi inovasi kolaboratif yang berdampak nyata. Sistem ini mendorong pemanfaatan hasil riset, keterlibatan dunia usaha, hilirisasi, penyebarluasan praktik baik, dan adaptasi inovasi pada daerah atau sektor lain.

Rumusan rekomendasi: “SATU JATIM INOVASI” perlu ditetapkan sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat keterhubungan antarpemangku kepentingan dan memperluas dampak inovasi dalam mendukung agenda pembangunan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

V. PENUTUP

Jawa Timur memiliki modal ekonomi dan sumber daya manusia yang kuat untuk mendorong pembangunan berbasis inovasi. Namun, potensi tersebut memerlukan ekosistem kolaborasi yang mampu menghubungkan sumber daya, pengetahuan, teknologi, dan berbagai aktor pembangunan secara efektif.

Tantangan utama bukan hanya menghasilkan lebih banyak inovasi, tetapi membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam seluruh siklus inovasi. Sinergi Quadruple Helix diperlukan agar inovasi tidak berkembang secara terpisah, melainkan menjadi solusi bersama yang dapat dikembangkan, diterapkan, dihilirisasi, direplikasi, dan diukur dampaknya.

Melalui “SATU JATIM INOVASI”, pengembangan inovasi diarahkan menjadi ekosistem kolaborasi multipihak melalui Forum Kolaborasi Inovasi Daerah, Roadmap dan Prioritas Inovasi Daerah, Dashboard Digital Kolaborasi dan Inovasi Terintegrasi, serta Sistem Insentif, Hilirisasi, dan Replikasi Inovasi.

Dengan pendekatan tersebut, inovasi diharapkan tidak berhenti sebagai program, hasil penelitian, atau capaian administratif, tetapi berkembang menjadi instrumen strategis pembangunan yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan. Penguatan kolaborasi akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, hilirisasi potensi daerah, konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, serta daya saing Jawa Timur.

Pada akhirnya, integrasi kekuatan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat melalui “SATU JATIM INOVASI” diharapkan memperluas dampak inovasi dan mempercepat terwujudnya Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2025*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2026). *Ekonomi Jawa Timur Tahun 2025: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Mencapai Rp3.403,17 Triliun dengan PDRB per Kapita Rp80,86 Juta*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). Mode 3 and Quadruple Helix: Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3–4), 201–234.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and Mode 2 to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*. Jakarta.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *OECD Regional Outlook 2023: The Longstanding Geography of Inequalities*. Paris: OECD Publishing.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.